

## Diplomasi Pertahanan Indonesia dengan Negara-Negara Di Asia Tenggara Untuk Meningkatkan Kapabilitas Militer

### *Indonesian Defense Diplomacy with Countries in Southeast Asia To Improve Military Capabilities*

Muhammad Rizki Yusro<sup>1</sup>, Obsatar Sinaga, Wawan Budi Darmawan  
Universitas Padjadjaran  
Jl. Bukit Dago No. 25 Kota Bandung, Jawa Barat

#### ABSTRACT

*The dynamics in the Southeast Asian region have fluctuated, from traditional threats to non-traditional threats. In responding to these changes, ASEAN and member countries formulated policies in the form of defense diplomacy to create security and maintain regional stability for the creation of a harmonious climate. This research purposes to explain and justify that one of the factors for increasing military capacity and capability is defense diplomacy conducted by countries in the Southeast Asian region, especially Indonesia. This research used a qualitative method with data collection using primary data in the form of interviews with informants and using secondary data, namely documentation studies. Based on the results of this study, defense diplomacy conducted by Indonesia and member countries within ASEAN are one of the factors in increasing military capacity and capability in creating a stable, harmonious and, equal region.*

#### ABSTRAK

Dinamika yang terjadi di kawasan Asia Tenggara mengalami pasang surut, mulai dari ancaman yang masih bersifat tradisional sampai ancaman yang sifatnya non tradisional. Dalam menyikapi ini, ASEAN maupun negara anggota memformulasikan kebijakan berupa Diplomasi pertahanan yang bertujuan untuk menciptakan keamanan serta menjaga stabilitas kawasan demi terciptanya iklim yang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan serta menjustifikasi bahwa salah satu faktor peningkatan kapasitas dan kapabilitas militer adalah diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh negara di kawasan Asia Tenggara terkhusus Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data menggunakan data primer yang berupa wawancara kepada informan serta menggunakan data sekunder yakni studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia maupun negara anggota didalam ASEAN merupakan salah satu faktor peningkatan kapasitas dan kapabilitas militer dalam menciptakan kawasan yang stabil, harmonis, dan setara.

#### HISTORI ARTIKEL

Diterima, 2 Oktober 2020  
Direvisi, 4 November 2020  
Disetujui, 17 Desember 2020

#### KATA KUNCI

Indonesia, ASEAN, Diplomasi Pertahanan, Kapasitas Militer, Kapabilitas, Defence Diplomacy, Military Capacity, Military Capability

## PENDAHULUAN

Perubahan dinamika lingkungan strategis di Asia Tenggara secara langsung berimplikasi terhadap respon setiap negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam memandang perubahan lingkungan strategis tersebut. Situasi politik internasional saat ini selain masih diwarnai oleh permasalahan lama yang belum berhasil diatasi, dan semakin bertambah kompleks dengan hadirnya serangkaian masalah baru (Kemenhan, 2008). Perkiraan ancaman, tantangan, dan



resiko penyelenggaraan pertahanan negara dapat ditentukan melalui analisis Perkembangan lingkungan Strategis (kemenhan 2015). Kedekatan geografis antar negara merupakan faktor penting dalam dinamika keamanan dikarenakan didalamnya terdapat sebuah hubungan keamanan yang terbentuk dan memiliki keterikatan atas reaksi-aksi yang timbal balik (Syahrin 2018).

Perkembangan lingkungan strategis di Kawasan Asia Tenggara secara garis besar masih di pengaruhi oleh pengaruh global. Ancaman yang paling mendasar adalah konflik kemanusiaan, persaingan persenjataan, dan perebutan wilayah kedaulatan (Yogatama 2018). Jika melihat kondisi pertahanan Indonesia, saat disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta yang pada hakikatnya adalah suatu pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya (kemenhan 2015). Konsepsi sistem pertahanan ini kemudian diejawantahkan kedalam Pembangunan, pembinaan, dan penggunaan postur pertahanan militer dan nirmiliter dirancang untuk menghadapi ancaman maupun potensi ancaman yang mungkin timbul dalam rangka untuk menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah Indonesia, dan melindungi keselamatan bangsa.

Masih terdapat masalah perbatasan yang belum terselesaikan oleh Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara. Terdapat sepuluh negara yang memiliki perbatasan maritim dengan Indonesia yakni Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam, serta perbatasan darat dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste (kemenhan 2015). Kemudian Prospek ancaman konflik Laut Cina selatan juga menjadi ancaman bagi stabilitas regional Asia Tenggara khususnya, karena pihak yang berselisih diantara anggota ASEAN (Malaysia, Philipin, dan Vietnam), pengaruh kekhawatiran terhadap semakin kuatnya militer menjadi faktor pengembangan persenjataan militer di Asia Tenggara semakin besar.

Kawasan Asia Tenggara memiliki sebuah potensi kekayaan alam yang banyak, sehingga ini menjadi sebuah daya Tarik kepentingan global agar memiliki pengaruh di kawasan dunia, potensi ini harus dioptimalkan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan menjadikan kawasan Asia Tenggara yang aman dan damai untuk itu diplomasi pertahanan harus selalu dilakukan oleh negara-negara di Kawasan Asia Tenggara (Kemenhan 2020). Saat ini Indonesia aktif melakukan sebuah langkah-langkah diplomasi pertahanan. Mulai dari mengirimkan pasukan perdamaian melalui Perserikatan Bangsa Bangsa, tercatat Indonesia pernah mengirimkan pasukan perdamaian ke Kamboja pada tahun 1994-1992 yang tergabung dalam pasukan garuda kontingen XII (Aditiya 2020). Diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia juga rutin melakukan pertukaran prajurit dengan mengikuti pendidikan militer tingkat lanjut antar negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia juga terlibat aktif dalam diplomasi di ruang lingkup ASEAN.

Pada penelitian ini, pembatasan masalah ditetapkan hanya mengkaji terkait bagaimana praktek diplomasi pertahanan Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam merespon Perkembangan lingkungan strategis dikawasan Asia Tenggara dari tahun 2014-2019 dalam hal untuk membangun rasa saling percaya, pembangunan kapasitas militer, dan juga industri militer.

Bagian pendahuluan diakhiri dengan rumusan masalah. Rumusan masalah berisi mengenai hal-hal yang diteliti. Bagian ini disampaikan dalam bentuk pernyataan penelitian/kajian (bukan dalam bentuk pertanyaan).



## TINJAUAN LITERATUR

### Diplomasi Pertahanan

Diplomasi merupakan cara yang digunakan oleh aktor-aktor hubungan internasional untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan mengedepankan cara-cara damai. Menurut Hedley Bull Pertama, diplomasi memfasilitasi komunikasi antara para pemimpin politik negara dan entitas lain dalam politik dunia. Fungsi kedua dari diplomasi adalah negosiasi perjanjian. Fungsi ketiga dari diplomasi adalah mengumpulkan intelijen atau informasi tentang negara asing dan Fungsi keempat dari diplomasi adalah meminimalkan efek gesekan dalam hubungan internasional (Bull 2002:158-160). Meminimalkan gesekan semacam ini, dan menahan pengaruhnya di tempat terjadinya, adalah salah satu fungsi utama diplomasi. Fungsi inilah yang mendorong definisi tentang diplomasi dalam istilah 'penerapan kecerdasan dan kebijaksanaan', dan yang menjelaskan penggunaan 'diplomatik' didunia kita untuk menggambarkan penanganan situasi manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang bijaksana.

Diplomasi pertahanan merupakan merupakan sebuah istilah yang relative baru dengan akarnya yang sangat terkait dengan kebutuhan bahasa politik baru yang menggambarkan kerja sama negara dan organisasi internasional setelah berakhirnya perang dingin (Drab 2018). Perluasan definisi diplomasi pertahanan adalah sebagai penggunaan angkatan bersenjata secara damai (non-konfrontatif) dan infrastruktur terkait sebagai alat kebijakan dan keamanan luar negeri. (Andrew Cottey 2004). Diplomasi pertahanan melalui berbagai aspek kerjasama seperti ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan diplomasi sehingga negara-negara dapat memiliki hubungan pertemanan, lebih jauh dapat saling bekerja sama, dan yang paling penting adalah meningkatkan kepercayaan. Terdapat tiga karakteristik tujuan yang dapat mengidentifikasi makna dari diplomasi pertahanan, yakni confidence building measures (CBMs), civil-military relation dan wider foreign policy objectives in the other countries' area of defense (Radon Pedrason 2015)

Terdapat dua karakteristik utama atas diplomasi pertahanan saat ini pertama, diplomasi pertahanan diarahkan terutama untuk mendukung kerja sama di antara negara-negara yang terlibat, bukan melawan musuh eksternal; dan kedua, secara terpusat berkaitan dengan tata kelola internal negara-negara yang bersangkutan, khususnya dukungan atas hubungan sipil-militer yang demokratis, tata kelola yang baik dari sektor keamanan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Andrew Cottey 2004). Penggunaan diplomasi pertahanan untuk tujuan keterlibatan strategis dan pencegahan konflik sebagian besar bergantung pada konteks politik yang lebih luas dari hubungan yang bersangkutan, dan harus dipandang sebagai proses jangka panjang.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dikategorikan dalam diplomasi pertahanan menurut Cottey & Forster adalah sebagai berikut:

1. Kontak bilateral dan multilateral antara pejabat militer dan pejabat sipil senior dilingkungan Kementerian Pertahanan;
2. Penempatan atase pertahanan dinegara-negara asing;
3. Kesepakatan kerjasama pertahanan bilateral;
4. Pelatihan bagi personel militer dan sipil Kementerian Pertahanan negara asing;
5. Memberikan keahlian dan saran terkait pada control angkatan bersenjata secara demokratis, manajemen pertahanan dan bidang teknis militer;
6. Kontak dan pertukaran antara unit dan personel militer serta kunjungan kapal;
7. Penempatan personel sipil dan militer di kementerian pertahanan atau angkatan bersenjata negara-negara mitra;
8. Mengirimkan tim training;
9. Penyediaan peralatan militer dan bahan bantuan lainnya;



#### 10. Latihan militer bilateral atau multilateral untuk tujuan pelatihan.

Hal inilah yang menjadikan diplomasi pertahanan mencakup berbagai macam kegiatan yang mungkin di masa lalu dapat digambarkan sebagai kerja sama militer atau bantuan militer (Andrew Cottey 2004).

Sebagai bahan referensi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rusfiana (2014) terkait Diplomasi Pertahanan yang berfokus pada strategi Indonesia dalam membawa kepentingan nasionalnya dengan memainkan peran di institusi ASEAN melalui ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM). Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai agenda dan kepentingan yang diusung oleh Indonesia dalam menjalankan diplomasi pertahanan dalam ADMM. Agenda dan kepentingan yang diusung oleh Indonesia terkait dengan kepentingan menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara dan mendapatkan dukungan dalam penyelesaian berbagai permasalahan keamanan internal seperti terorisme dan keamanan maritimnya.

Felicia Permata Hangu dan Leonard Hutabarat (2018) terkait diplomasi pertahanan dan kepentingan Indonesia kepada kelima negara anggota FPDA (2000-2017). Penelitian menyajikan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia telah dilakukan secara aktif pada periode 2000-2017 dengan memprioritaskan pada pembangunan kepercayaan (CBM) dengan melaksanakan 5 bentuk diplomasi pertahanan kepada FPDA (kerjasama bilateral dan multilateral, penempatan atase pertahanan, pelatihan dan pemberian keahlian, kontak dan pertukaran, penugasan personal, serta latihan militer).

Jun Yan Chang (2011) meneliti terkait semua kegiatan diplomasi pertahanan yang dilakukan di ASEAN baik itu secara bilateral dan multilateral antara negara-negara anggota ASEAN yang termasuk dalam lingkup diplomasi pertahanan. Menurutnya di ASEAN Terdapat *Triangulating Defence Diplomacy*, Track pertama, diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh militer secara langsung seperti agenda pertemuan dan latihan dibawah menteri pertahanan negara-negara ASEAN, track kedua adalah diplomasi pertahanan yang diselenggarakan oleh Network of ASEAN Defence and Security (NADI) yang terdiri dari lembaga think-tank dan lembaga penelitian untuk mendukung ADMM. Track ketiga adalah diplomasi pertahanan yang merupakan campuran dari track pertama dan track kedua misalnya dialog Shangri-la yang diadakan setiap tahun oleh International Institute for strategic studies (IISS) di Singapura.

Selanjutnya dari Andrew Tan (2004) yang meneliti terkait program-program modernisasi militer Negara-negara Asia Tenggara, dalam beberapa tahun terakhir. Adapun faktor yang kompleks menjelaskan fenomena modernisasi militer dan penumpukan senjata di wilayah tersebut, seperti gengsi, korupsi, faktor sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi, kemandirian dalam konteks yang dipersepsikan. Pengurangan komitmen AS terhadap kawasan, persyaratan baru yang timbul dari pengawasan dan perlindungan ZEE, dampak faktor domestik, ketegangan antar negara dan perluasan masalah keamanan kawasan.

Dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa, pertama, dalam isu keamanan dan pertahanan di kawasan Asia Tenggara Indonesia lebih mengedepankan diplomasi pertahanan secara multilateral dan organisasi ASEAN sebagai Wadahnya. Kedua, diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara masih berfokus pada langkah-langkah Confidence Building Measures (CBM). Ketiga, perkembangan lingkungan Strategis di kawasan Asia negara membuat negara-negara di kawasan meningkatkan kapabilitas pertahanannya baik membangun industri pertahanan secara mandiri ataupun membangun kerjasama strategis dalam bidang pertahanan dengan negara lain. Adapun kebaruan dari penelitian ini adalah Pertama, memetakan aktifitas-aktifitas diplomasi pertahanan Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara secara bilateral/multilateral. Kedua, mengevaluasi pola diplomasi pertahanan Indonesia di kawasan Asia Tenggara dengan tujuan membangun kepercayaan, membangun kapasitas pertahanan dan industri pertahanan.



## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif jenis Studi Kasus yang Prosedur utamanya melibatkan sampling purposeful (untuk memilih kasus yang dianggap penting), yang kemudian dilanjutkan dengan analisis holistik atas kasus tersebut melalui deskripsi detail atas pola-pola, konteks dan setting di mana kasus itu terjadi (Creswell 2009).

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan sumber yang dapat memberikan data secara langsung seperti didapatkan melalui wawancara tatap muka kepada setiap informan. Sementara data sekunder, peneliti mendapatkannya dari studi dokumentasi.

Apabila melakukan wawancara di lapangan, peneliti terlebih dahulu harus menentukan informan melalui sebuah metode yaitu purposeful sampling sehingga nantinya pada saat di lapangan dan melakukan wawancara, informan yang dituju diharapkan bisa mengemukakan data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selain menggunakan metode purposeful sampling, tidak menutup kemungkinan nantinya akan dilakukan metode snowball sampling. Hal ini dilakukan jika ternyata dari informan yang terpilih belum didapatkan data yang lengkap sehingga diperlukan informan-informan lainnya berdasarkan pertimbangan sejauh dan sevalid apa data yang sudah didapat.

Adapun informan yang diwawancarai terkait penelitian ini, antara lain pimpinan atau staf yang berada di lingkungan:

1. Kementerian Pertahanan Indonesia
2. Tentara Nasional Indonesia
3. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Diplomasi pertahanan Indonesia di ASEAN

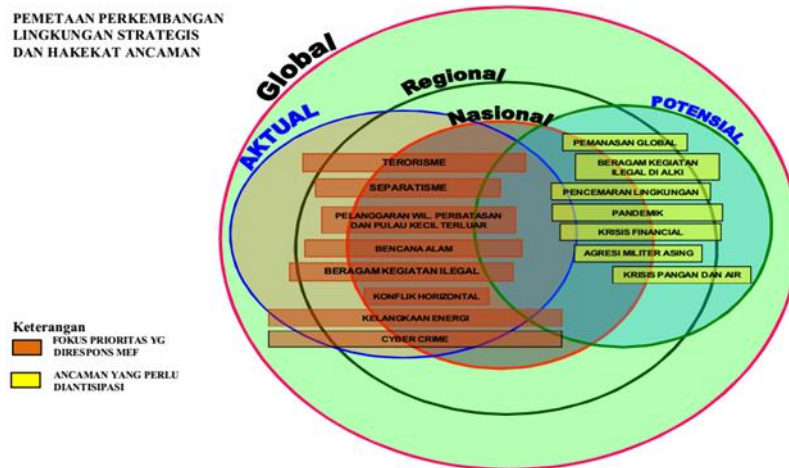
Esensi dari diplomasi pertahanan terbangun dari dua aspek, yaitu penggunaan militer dan kepentingan nasional. Motif ini sekaligus menjadi legitimasi dalam ranah politik keamanan, karena konsep kepentingan nasional yang menjadi alasan utamanya.

Merujuk pada konsep Morgenthau, perihal kepentingan nasional suatu negara harus berlandaskan kepada dua faktor yaitu, faktor internal suatu negara (ekonomi, politik, keamanan) dan juga faktor eksternal yang harus menyesuaikan diri dengan keadaan kawasan negara tersebut (Husna 2012). Dengan penjelasan faktor pendorong kepentingan nasional di atas, tentunya menjadi penting dalam menganalisis perihal kepentingan nasional suatu negara lewat pembacaan kondisi dan situasi kawasan (keadaan eksternal suatu negara) yang tengah terjadi. Tekhususnya dalam tulisan ini analisa di fokuskan terhadap negara Indonesia serta dengan memfokuskan pada aspek keamanannya.

Diskursus keamanan bergerak secara sangat dinamis. Hal ini berkorelasi dengan dinamika interaksi antar aktor dalam politik global yang semakin hari semakin berubah menjadi lebih kompleks. Kecenderungan pengaruh yang dihasilkan dari dinamisnya diskursus kewanman kawasan terkhususnya di Asia Tenggara dapat terlihat dari munculnya konflik yang bersumber dari klaim teritorial, kewanman jalur komunikasi laut dan jalur perdagangan melalui laut, sampai kepada masalah kewanman nontradisional semacam terorisme, *cyber crime*, perompakan, penangkapan ikan ilegal, hingga penyelundupan senjata yang hadir di Asia Tenggara.

Negara-negara Asia Tenggara, terkhususnya yang tergabung menjadi anggota ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Kamboja menunjukkan indikasi bahwa mereka menjadikan keamanan dalam negeri menjadi salah satu tantangan utama. Perkembangan ekonomi yang lemah, hubungan sipil dan militer yang tidak stabil, etnis, dan perbedaan agama, serta separatisme telah diindikasikan sebagai masalah keamanan utama di banyak negara Asia Tenggara.

Namun terdapat pula ancaman terhadap keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara yang bersumber dari dua sumber, yaitu ketegangan bilateral dan ketegangan ekstra regional. Pertama sejak ASEAN menjadi 10 negara, Asia Tenggara relatif terbebas dari konflik dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini telah dibuktikan dengan data bahwa konflik fisik antar negara Asia Tenggara berkemungkinan minim (Radon Pedrason 2015). Namun hal ini tidak berarti bahwa negara-negara Asia Tenggara (terkhususnya Indonesia) tidak harus mempersenjatai diri untuk kepentingan keamanan serta melakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi ancaman yang secara tidak terprediksi bisa datang.



**Gambar 1. Pemetaan Perkembangan Lingkungan Strategis dan hakikat Ancaman**

*Sumber: Kementerian Pertahanan*

Dapat dilihat dari pemetaan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap perkembangan lingkungan strategis terbagi menjadi dua fokus ancaman, yakni fokus terhadap ancaman faktual dan fokus terhadap ancaman potensial. Isu terorisme, separatisme serta pelanggaran wilayah kedaulatan seperti pencurian ikan, dan penyeludupan senjata, *cyber crime* masih menjadi ancaman yang nyata.

Serta dalam faktanya masih banyak sekali masalah perbatasan yang belum terselesaikan oleh Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti halnya konflik Laut Cina Selatan serta konflik perbatasan lainnya, hal ini dapat menjadi fenomena yang sewajarnya dengan pertimbangan bahwa sepuluh negara yang memiliki perbatasan maritim dengan Indonesia yakni Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam, serta perbatasan darat dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste (kemenhan 2015).

Dengan saling bersinggungannya perbatasan perairan maupun daratan dengan negara lain tentunya menjadi konsekuensi logis dimana hal tersebut bisa menjadi sumber konflik perbatasan dengan negara lainnya. Dan terlepas dari itu pemetaan yang telah dipaparkan di atas secara jelas cukup membuktikan bahwa ancaman yang nyata (aktual) hingga yang baru bersifat potensial telah menjadi momok bagi negara-negara Asia Tenggara terkhususnya Indonesia.



Ancaman yang dihadapi semakin berkembang dan berubah bentuk menjadi semakin transnasional atau lintas batas serta non militer. Dan oleh karena itu pentinglah bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk melakukan kerjasama guna menangani ancaman secara kolektif untuk menciptakan kawasan yang lebih aman dan stabil. Hal ini secara otomatis menjadi kepentingan nasional bagi masing-masing negara Asia Tenggara terkhususnya negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.

Perkembangan ancaman yang terjadi di Asia Tenggara mendorong negara anggota ASEAN untuk membentuk forum baru secara khusus membahas masalah keamanan. Sebuah forum dialog dibentuk dengan para menteri pertahanan dan para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN, yang disebut ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM).

ADMM merupakan pertemuan menteri Pertahanan ASEAN yang membahas penguatan kerja sama pertahanan di kawasan guna meningkatkan transparansi, keterbukaan dan rasa saling percaya di antara negara-negara anggota ASEAN. *Platform* kerjasama antar menteri pertahanan ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan *Confidence Building Measures* (CBM) serta menjaga perdamaian dan stabilitas (Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia 2020).

Berdasarkan definisi dari United Nation (UN) CBM adalah prosedur terencana untuk mencegah permusuhan, mencegah eskalasi, untuk mengurangi ketegangan militer, dan untuk membangun rasa saling percaya antar negara. Mereka telah diterapkan sejak awal peradaban, di semua benua (United Nations 2020). Maka secara ringkasnya CBM bertujuan untuk mencegah eskalasi konflik yang terjadi dan menciptakan siklus hubungan secara damai serta stabil diantara negara dan aktor internasional lainnya.

Mengutip Pedrason dalam disertasinya menuturkan bahwa pada pertemuan perdana ADMM di Kuala Lumpur Malaysia pada 9 Mei 2006, muncul konsep dan terminologi baru dalam kerja sama pertahanan ASEAN, yaitu diplomasi pertahanan. Seperti yang dikatakan juru bicara sekretariat ASEAN, MC Abad, "diplomasi pertahanan akan mengkonsolidasikan hubungan perdamaian dan stabilitas yang berlaku di Asia Tenggara dengan mempromosikan konvergensi yang lebih besar antara keamanan nasional dan keamanan regional" (Radon Pedrason 2015). Dengan hadirnya konsep diplomasi pertahanan yang diperkenalkan pada forum perdana ADMM di Kuala Lumpur, Malaysia, telah menjadikan ASEAN lewat ADMM telah terlihat melakukan kegiatan kawasan, serta negara anggota ASEAN telah menggunakan berbagai macam diplomasi pertahanan untuk memajukan keamanan, serta kebijakan luar negeri mereka.

Terlepas dari itu, Keberadaan ADMM menjadi salah satu penopang bagi terbangunnya salah satu pilar ASEAN Community yang akan diterapkan pada tahun 2015 yakni ASEAN Political and Security Community (APSC). Salah satu dasar dalam pembentukan sebuah komunitas dalam kawasan adalah rasa saling percaya antara satu dengan lainnya. Demikian pula dalam pilar komunitas politik dan keamanan, unsur utama dalam hal ini adalah rasa saling percaya bahwa kebijakan pertahanan yang dikeluarkan oleh sebuah negara bukan ditujukan untuk mengancam negara lain dalam komunitas tersebut (Rusfiana 2018). Maka dalam hal ini ADMM memainkan peranan signifikan dalam upaya untuk memperkuat pilar ASEAN Community dalam bidang politik dan keamanan.

Dinamika keamanan di kawasan Asia Tenggara tentunya menjadi hal yang penting bagi tercapainya kepentingan nasional bagi Indonesia, maka dengan mendasarkan pada landasan tersebut, Indonesia berupaya untuk mencapai diplomasi pertahanan di kawasan. Hal ini dapat dilihat dari upaya Indonesia untuk mengubah perilaku negara lain agar tidak menunjukkan sikap permusuhan dalam kebijakan pertahanan yang berpotensi menimbulkan gejolak instabilitas di kawasan. Disamping itu, Indonesia pun berupaya untuk mengubah persepsi negara lain agar tidak menganggap bahwa kebijakan pertahanan yang diambil oleh Indonesia sebagai sebuah ancaman yang dapat mengganggu stabilitas kawasan (Rusfiana 2018).



Hal ini berkorelasi dengan hadirnya ADMM, Indonesia memaknai ADMM menjadi salah satu mekanisme yang efektif demi pengimplementasian diplomasi pertahanan. Hal ini terkait dengan sifat dari ADMM yang merupakan Forum multilateral sebagai wadah yang tepat untuk mempertemukan kepentingan keamanan negara-negara di Asia Tenggara maupun dengan negara-negara di luar Asia Tenggara, Indonesia memafaatkan berbagai dialog konstruktif yang digelar untuk menyampaikan berbagai kebijakan pertahanan yang terkait dengan respon Indonesia terhadap dinamika keamanan baik yang berasal dari dalam kawasan, Global, hingga dinamika keamanan nasional.

Selain ADMM yang dibentuk sebagai platform kerjasama perihal keamanan, adapun ADMM-Plus merupakan bentuk perluasan kerja sama Pertahanan ADMM dengan melibatkan 8 (delapan) Negara Mitra Wicara ASEAN, yakni Amerika Serikat, Australia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, Republik Korea (ROK), Selandia Baru, India, dan Rusia (Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia 2020).

Sejak pelaksanaan The Inaugural Meeting of ADMM di Kuala Lumpur, Mei 2006, dan The Inaugural ADMM-Plus di Ha Noi, Oktober 2010, telah banyak kemajuan yang dicapai oleh ADMM dan ADMM-Plus, mulai dari kerja sama *capacity building*, pembangunan rasa saling percaya, hingga kerja sama yang bersifat praktis dan konkret seperti peningkatan koordinasi dan interoperabilitas antar personil pertahanan dan militer negara-negara anggotanya. Sejumlah bentuk kerja sama dalam ADMM dan ADMM-Plus, antara lain: seminar, lokakarya, dan pelatihan bersama (Table-Top-Exercise dan Field-Training-Exercise). Tercatat dari tahun 2006 hingga 2019 pertemuan yang telah dilakukan dalam kerangka ADMM dan ADMM Plus mencapai 254 pertemuan terhitung sampai bulan Desember 2019 (ASEAN Defense Ministers Meeting 2020).

Dalam rangka mengimplementasikan kerja sama yang telah diupayakan, secara signifikan memberikan dampak perkembangan yang cukup pesat dalam menghasilkan kondisi kawasan yang stabil terhindar dari eskalasi konflik dengan dibentuknya sejumlah ADMM-Plus *Experts Working Groups* (EWGs) pada tujuh area yang telah disepakati bersama, antara lain: (1) Humanitarian; (2) Assistance and Disaster Relief (HADR); (3) Military Medicine (MM); (4) Counter Terrorism (CT); (5) Maritime Security (MS); (6) Peacekeeping Operations (PKO); (7) Humanitarian Mine Action (HMA); (8) Cyber Security (CS).

Untuk mempermudah koordinasi dan implementasi kegiatan-kegiatan EWG, setiap EWG memiliki sistem Keketuaan Bersama (*co-chairmanship*) yang dipegang oleh dua negara (Satu Negara Anggota ASEAN dan Satu Negara Mitra Wicara) selama periode tiga tahun. Untuk periode 2017-2020, Indonesia merupakan *Co-chair ADMM-Plus EWG on Peacekeeping Operations* bersama dengan Australia (Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia 2020).

Pada pertemuan ADMM-Plus 11 November yang digelar di Bangkok, delegasi Indonesia turut serta dalam dialog perihal perkembangan keamanan, baik secara kawasan maupun domestik tiap-tiap negara yang terkait. Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan Republik Indonesia menuturkan perihal kekhawatiran ancaman tradisional sampai ke isu non-tradisional. Terlebih menhan RI menekankan perihal dinamika pasang konflik perbatasan di Laut Cina Selatan (LCS) dan semenanjung Korea yang diwarnai oleh pasang surutnya kekuatan aktor besar di dalamnya. Namun mengutip tulisan di website Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bahwa Terkait isu LCS, lebih lanjut Menhan RI menyampaikan bahwa Indonesia mengapresiasi perkembangan positif terkait dengan LCS khususnya kesepakatan untuk finalisasi *Code of Conduct* (CoC) terhadap sengketa LCS yang harus didorong bersama untuk dijaga stabilitasnya agar tidak mengganggu jalur komunikasi dan perdagangan (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2019)

Sementara itu, perkembangan permasalahan Korea Utara juga menunjukkan perkembangan positif dengan membaiknya komunikasi dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat, serta penanganan Rakhine State di Myanmar yang lebih baik. Menurut Menhan RI





dinamika konflik perbatasan yang telah terjadi tentunya memerlukan langkah diplomatis dan dukungan dunia internasional demi tercapainya perdamaian dan kestabilan keamanan di kawasan. Pipenghujung kesempatan Menhan RI menegaskan bahwa seberapa jauh kekuatan regional menjadi solid tergantung pada bagaimana setiap negara mampu menyelesaikan berbagai persoalan domestik dan persoalan bilateral dengan baik (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2019).

### **Diplomasi Pertahanan Indonesia dengan Negara-negara Asia Tenggara**

Prinsip non-intervensi yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan sengketa antar negara anggota ASEAN disinyalir dapat melahirkan rasa ketidakpercayaan yang berkepanjangan satu sama lain sekaligus menjadi hambatan tersendiri bagi ASEAN untuk membangun integrasi kawasan di Asia Tenggara yang solid dan mengikat. Seiring berkembangnya zaman yang ditandai dengan meningkatnya inter-koneksi dan inter-relasi dalam arus globalisasi semakin menunjukkan bahwa dari sekian konflik internal yang terjadi di ASEAN, jika tidak diselesaikan dengan memanfaatkan forum ASEAN tentunya cepat atau lambat dapat berdampak pada nilai-nilai universal HAM dan demokrasi.

ASEAN sebagai organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara seringkali mengalami stagnansi ketika melakukan manajemen konflik dalam sengketa yang terjadi, baik antar sesama negara anggota atau pun dengan pihak eksternal di luar kawasan. Respon dan peran ASEAN terbatas dan belum mampu menjadi organisasi yang supranasional karena harus memikirkan prinsip non-intervensi yang terkandung di dalam *ASEAN Way*.

Negara-negara ASEAN masih mengalami dikotomi kedaulatan dan integrasi kawasan. Di satu sisi, negara-negara ASEAN menginginkan integrasi kawasan sebagai bentuk peningkatan kerja sama di antara negara-negara Asia Tenggara, namun di sisi lain negara-negara ASEAN juga tidak ingin kedaulatan dalam pengertian yang seutuhnya menjadi terkikis. Negara-negara ini cenderung memaknai kedaulatan secara absolut seperti halnya dalam sistem *Westphalian*. Konsep kedaulatan ini masih dipegang oleh negara-negara Asia Tenggara sebagai sistem konvensional yang mengacu pada landasan politis dan latar belakang sejarah masing-masing negara. Metode penyelesaian yang dilakukan tidak boleh melanggar prinsip non-intervensi dan karenanya, kelemahan dalam integrasi kawasan Asia Tenggara adalah masalah seputar kepercayaan dan kesalingcurigaan (*trust issues*).

Seperti yang diungkapkan oleh Marty Natalegawa selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2009-2014, di dalam bukunya yang berjudul *Does ASEAN Matter: A View from Within*, dijelaskan bahwa sebelum ASEAN lahir pada tahun 1967, hubungan antar negara di Asia Tenggara sarat ketegangan dan konflik terbuka, serta ditandai dengan defisit kepercayaan. Dalam 50 tahun telah terjadi perubahan dinamika, dari defisit kepercayaan menjadi kepercayaan strategis di mana setiap konflik hampir bisa dikesampingkan meskipun masih tetap terdapat defisit kepercayaan antar negara Asia Tenggara (Natalegawa 2019).

Tantangan dalam defisit kepercayaan adalah meningkatnya tensi permasalahan karena adanya sengketa wilayah yang belum terselesaikan dan dilema keamanan. Terkait sengketa wilayah yang belum terselesaikan ini dibutuhkan komitmen dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menghormati dan menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan aturan-aturan tertentu yang telah disepakati agar menghindari kesalahan perhitungan atau munculnya krisis yang tidak diinginkan. Tantangan lainnya adalah metode untuk mengelola perubahan. Perubahan dan transformasi telah terjadi di seluruh kawasan Asia Tenggara mencakup bidang politik, keamanan, sosial budaya, dan ekonomi yang memiliki dampak tidak hanya bagi internal suatu negara tetapi juga negara-negara di sekitarnya.



Untuk mensiasati hal tersebut, Indonesia telah mengambil inisiatif peran melalui diplomasi pertahanan dengan negara-negara Asia Tenggara dan tidak hanya mengandalkan kerangka multilateral ASEAN saja. Inisiatif ini dilakukan karena kerap kali, negara-negara Asia Tenggara yang berkonflik memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikannya dan tidak selalui memilih jalur multilateral meskipun sudah ada ASEAN sebagai organisasi aktif dalam kawasan. Indonesia merancang suatu konsep diplomasi pertahanan yang dikenal dengan istilah diplomasi total.

Konsep diplomasi total merupakan konsep diplomasi yang melibatkan semua pemangku kewenangan diplomasi Indonesia agar berpartisipasi aktif karena pada hakikatnya diplomasi merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa. Diplomasi akan semakin kuat ketika semua komponen dimulai dari komponen utama, komponen pendukung, dan komponen cadangan turut ikut serta dalam mempromosikan Indonesia dan memperjuangkan kepentingan nasional (Budi & Berantas 2014). Karena institusi ASEAN yang masih memiliki kelemahan di dalam kerangka multilateral, maka diplomasi pertahanan yang akan menjadi fokus pembahasan di bagian ini adalah diplomasi pertahanan secara bilateral atau pun di luar kerangka multilateral ASEAN.

Defisit kepercayaan mewujud pada dua pokok permasalahan, yaitu sengketa wilayah perbatasan dan dilema keamanan yang pada gilirannya berusaha diatasi melalui diplomasi pertahanan. Contoh dari sengketa wilayah perbatasan adalah Laut Cina Selatan yang memiliki historis yang cukup panjang. Wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya alam terutama mineral, minyak bumi dan gas alam. Konflik antarnegara yang terlibat saling klaim kepemilikan atas pulau-pulau di sana baru muncul di dasawarsa 1970, dan berulang kembali di dasawarsa 80-an sampai sekarang. Sengketa di Laut Cina Selatan melibatkan Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Wilayah perairan yang diklaim Cina juga meliputi sebagian zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. Namun, tidak dapat disangkal di masa lalu, penguasa-penguasa tradisional dari Cina dan Vietnam pernah terlibat memperebutkan kontrol atas wilayah perairan di sana (Darmawan & Kuncoro 2019).

Pasca perang dingin, sejumlah sengketa wilayah telah mengemuka dan dianggap berpotensi mengganggu hubungan antar negara anggota ASEAN.

Tabel 1. Sengketa Wilayah di Asia Tenggara

Sengketa Wilayah di Asia Tenggara			
No	Negara yang bersengketa	Sengketa	Penjelasan
1	Malaysia dan Singapura	Sengketa perbatasan Pulau Pedra Branca di lepas pantai Johor	Singapura mengklaim pulau itu atas dasar bahwa mereka telah menjalankan kendali sejak tahun 1840-an. Malaysia, di sisi lain, menyatakan pulau itu merupakan wilayah kedaulatan mereka. Ketegangan semakin meningkat ketika terjadi masalah terkait landasan helikopter yang dibangun oleh Singapura dan pengejaran nelayan Malaysia oleh Angkatan Laut Singapura.



2	Malaysia dan Indonesia	Sengketa perbatasan Pulau Miangas	<p>Miangas adalah pulau terluar Indonesia yang terletak dekat perbatasan antara Indonesia dengan Filipina. Untuk menjangkau Pulau Miangas, jarak yang di tempuh dari kota Bitung adalah 493 Km dan menempuh perjalanan laut 2,5 jam dan melanjutkan perjalanan ke Pulau Tahuna 1 Jam. Dari Pulau Tahuna, perjalanan dilakukan dengan menggunakan kapal perintis yang singgah setiap 2 minggu. Perjalanan dengan kapal perintis ke Pulau Miangas membutuhkan waktu sekitar 14 jam. Sedangkan jarak antara pulau Miangas dengan pulau Mindanau Filipina hanya 77 km. Dari aspek waktu tempuh pun, hanya butuh 30 menitan menggunakan speedboat dari Filipina menuju Miangas. sehingga pulau Miangas juga di namakan Las Palmas (Palmas Island) oleh negara Filipina dan pulau Las Palmas ada di dalam peta Filipina.</p>
3	Malaysia dan Thailand	Sengketa penyalahgunaan ketentuan perjanjian	<p>Sebuah perjanjian yang mengizinkan personel militer Thailand dan personel militer Malaysia untuk melakukan operasi lintas batas ditandatangani antara kedua negara. Namun sebuah insiden pada bulan Desember 1991 dimana pasukan Thailand melepaskan tembakan ke arah wilayah Padang Besar (Malaysia) membuat Malaysia menuduh Thailand menyalahgunakan ketentuan perjanjian karena sering melakukan intrusi.</p>
4	Malaysia dan Brunei	Sengketa perbatasan Limbang	<p>Pada tahun 1916, kolonial Inggris di Malaysia secara resmi mengakui Limbang sebagai bagian dari Sarawak, tetapi Brunei tidak pernah mengakui penyerahan itu karena Limbang dianggap sebagai wilayah di bawah Kesultanan Brunei.</p>
5	Malaysia dan Filipina	Sengketa perbatasan Pulau Sabah	<p>Pada tahun 1961 ada rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu yang terdiri dari Singapura, Sarawak,</p>



			Brunei, dan Sabah. Filipina menolaknya karena mengklaim Sabah yang akan menjadi bagian dari negara federasi tersebut dimiliki oleh Kesultanan Sulu yang disewakan kepada kolonial Inggris. Sampai saat ini Filipina masih menganggap bahwa Sabah merupakan wilayah kedaulatannya.
6	Thailand dan Kamboja	Sengketa kepemilikan Kuil Preah Vihear serta kejelasan perbatasan wilayah	Akar masalah sengketa kuil ini lahir karena ketidakjelasan kesepakatan antara pemerintah Perancis (yang men-duduki Kamboja) dan Pemerintah Siam (kini Thailand) pada awal tahun 1900.
7	Thailand dan Laos	Sengketa perbatasan wilayah	Sengketa antara Thailand–Laos terkait wilayah desa, yang diklaim Thailand masuk ke distrik Chat Trakan, Provinsi Phitsanulok, juga diklaim oleh Laos masuk ke Distrik Laotian Boten, Provinsi Xaignabouri.
8	Cina, Taiwan, Vietnam, Brunei, Malaysia dan Filipina.	Sengketa perbatasan kepulauan Spratly	Kepulauan Spratly terletak di bagian selatan dari Laut Cina Selatan. Terdiri lebih dari 230 pulau kecil.

*Sumber: Jurnal Penelitian Politik Volume 11 No. 1 Juni 2014, Meninjau Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan di ASEAN, Awani Irewati.*

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan bagaimana dinamika di kawasan Asia Tenggara yang pasang-surut. Beberapa sengketa sudah berhasil diatasi, namun ada juga beberapa yang masih *status-quo*. Secara tidak langsung, hal ini juga mempengaruhi defisit kepercayaan antar negara. Ditambah lagi, terdapat konflik sengketa wilayah yang melibatkan lebih banyak negara, yaitu sengketa Laut Cina Selatan yang menjadi tantangan tersendiri bagi stabilitas keamanan di kawasan, apakah akan tetap berkuat pada dilema keamanan atau berhasil mengintegrasikan kepentingan kawasan sehingga diplomasi pertahanan yang dilakukan masing-masing negara tidak meningkatkan defisit kepercayaan.

Sejauh ini, Indonesia memiliki langkah yang cukup optimis di dalam politik luar negerinya untuk berusaha mengintegrasikan kepentingan ASEAN sebagai organisasi kawasan Asia Tenggara di atas kepentingan-kepentingan nasional negara anggota. Salah satunya, hal ini diupayakan melalui diplomasi total. Dalam konteks ini, diplomasi pertahanan mempunyai konsekuensi yang harus dijalankan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut sebagaimana makna sistem pertahanan negara itu sendiri (Budi & Berantas 2014).

Di luar dari kerangka multilateral ASEAN, Indonesia melakukan diplomasi bilateral dengan negara-negara Asia Tenggara (dengan anggota ASEAN atau pun non-ASEAN). Bahkan, beberapa di antaranya menjalani diplomasi multilateral dengan Indonesia namun di luar dari kerangka multilateral ASEAN. Langkah-langkah ini sengaja dilakukan Indonesia sebagai bentuk diplomasi total karena kerangka multilateral ASEAN belum mampu secara mumpuni memfasilitasi Pilar *ASEAN Political and Security Community* (APSC). Untuk mewujudkan pilar ini



agar solid dan bersinergi efektif, komunitas pertahanan ASEAN dituntut untuk memperkuat kerja sama pertahanan yang lebih konkrit, terutama dalam merespon tantangan global yang dapat berimplikasi terhadap kepentingan stabilitas di Asia Tenggara (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2014).

Tabel 2. Diplomasi Pertahanan secara bilateral Indonesia dengan negara ASEAN

Diplomasi Pertahanan secara Bilateral Indonesia dengan Negara ASEAN			
No	Negara yang bekerjasama	Isu Kerjasama	Keterangan
1	Negara-negara ASEAN	Mengelola perbatasan	Kerja sama tersebut diantaranya adalah kerja sama dalam mengelola perbatasan, termasuk sengketa Laut Cina Selatan. Indonesia sepakat untuk meminimalisasi konflik perbatasan darat maupun laut melalui upaya diplomasi dengan tetap mengedepankan integritas dan konsep negara kesatuan. Selain itu, khusus dengan negara-negara ASEAN, Indonesia menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan dan latihan militer, pertukaran informasi, dan penanganan terorisme.
2	Malaysia	Perdagangan Manusia	pada tahun 2005 lalu telah disepakati pembentukan <i>Memorandum of Understanding (MOU)</i> antara Indonesia dan Malaysia mengenai penempatan dan perlindungan TKI ke Malaysia, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. MOU ini dibentuk untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja Indonesia di Malaysia dari berbagai tindak kekerasan ketika bekerja, setelah sebelumnya pada bulan Juli tahun 1972 lalu, Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk membentuk <i>General Border Committee Indonesia-Malaysia (GBC Malindo)</i> untuk memperkuat kerjasama dalam menangani berbagai masalah di sepanjang wilayah perbatasan, termasuk masalah perdagangan manusia.
3	Singapura	Pertahanan maritim dan pertukaran informasi serta intelijen pertahanan maritim	Sejak 1998-2016 perjanjian bilateral ini adalah bagian dari diplomasi pertahanan Indonesia yang bertujuan meningkatkan pembangunan kepercayaan sekaligus memperkuat kapabilitas pertahanan di tengah ketidakpastian situasi kawasan.
4	Filipina	Terorisme	CORPAT Philindo adalah implementasi dari upaya untuk meningkatkan kerjasama dalam saling percaya dan <i>Capacity Building</i> kedua negara. Kegiatan latihan bersama yang dilaksanakan, merupakan program latihan rutin yang dilaksanakan antara pihak TNI AL dengan <i>Republic of Philipines Navy</i> antara lain, melaksanakan tugas pokok Operasi Patroli terkoordinasi dalam waktu yang telah ditentukan yang meliputi pencegahan atau



			penangkalan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran wilayah dan tindak kejahatan di wilayah perairan laut Indonesia – Filipina
5	Kamboja	Kerjasama Militer dan Pertahanan	Sejak tahun 1970-an dan pada Desember 2007 telah menandatangani <i>MoU between the Indonesian National Army and the Army of the Royal Cambodian Armed Forces (RCAF) on Army-to-Army talk</i> di Kamboja. secara berkesinambungan telah memberikan bantuan Pelatihan kepada <i>Royal Cambodian Armed Forces (RCAF)</i> , khususnya Brigade 911 dan Pasukan Pengamanan Perdana Menteri (Paspam PM), dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Misi utama Pelatihan adalah peningkatan kualitas SDM dan profesionalisme para prajurit Paspam PM Kamboja serta komitmen RI, untuk terus memelihara dan meningkatkan kerja sama militer dan pertahanan.
6	Thailand	Kerjasama Militer dan pertahanan	Telah terbentuknya komitmen untuk saling tukar kunjungan rutin antara pimpinan Angkatan Bersenjata kedua negara, latihan bersama, seminar dan pertukaran informasi, serta pertukaran siswa dalam rangka pendidikan Sekolah Staf Komando. Koordinasi dan kerja sama Badan Intelijen Negara (BIN) RI dengan <i>National Intelligence Agency (NIA)</i> Thailand juga berjalan dengan baik, di mana kedua pihak mempertahankan dan berupaya meningkatkan hubungan yang lebih erat. Selain itu, kedua negara telah memiliki kesepakatan dalam pemberantasan perdagangan obat terlarang di bawah payung kerja sama <i>MoU between the Office of the Narcotics Control Board of the Kingdom of Thailand and the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia on the Cooperation in Controlling Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, their Precursors and Chemicals, and Drug Abuse</i> , antara Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dengan <i>Office of Narcotics Control Board (ONCB)</i> Thailand.
7	Laos	Kerjasama Militer dan Pertahanan	Sejak tahun 1970 sampai dengan 2019, Laos telah mengirimkan lima Perwira untuk mengikuti Sesko Angkatan dan Sesko TNI. Bahkan di tahun 2019 Menhan RI dan Menhan Laos melakukan pertemuan bilateral, dan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama tentang kerjasama pertahanan antara Kemhan RI dan Kemhan PRD Laos " <i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Lao People's Democratic Republic on Cooperation in the Field of Defence</i> ".
8	Brunei	Kerjasama Militer dan Pertahanan	Terangkum dalam <i>oint Defence Cooperation Committee (JDCC)</i> RI – Brunei Darussalam sebagai salah satu implementasi dari MoU pertahanan antara Indonesia



			dengan Brunei Darussalam yang telah ditandatangani pada tahun 2013.
9	Myanmar	Kerjasama Militer dan Pertahanan	Terja sama bilateral Indonesia dengan Myanmar khususnya di bidang pertahanan hanya bisa dibahas di dalam <i>Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) RI – Myanmar</i> sebagai mekanisme utama dialog bilateral tingkat menteri di kedua negara
10	Vietnam	Kerjasama Militer dan pertahanan	Pada tahun 2016, telah diadakan pertemuan bilateral guna memperkuat kerja sama bilateral. Pada pertemuan itu kedua Menhan membahas isu-isu keamanan regional maupun langkah-langkah penguatan kerjasama pertahanan yang telah berjalan. Kedua Menhan sepakat untuk meningkatkan kerjasama pertahanan yang telah berjalan selama ini antara lain pertukaran siswa untuk menempuh pendidikan militer, latihan bersama dan bentuk kerjasama lainnya. Kerja sama bilateral bidang pertahanan kedua negara diatur didalam MOU Pertahanan RI-Vietnam yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2010.

Sumber: diolah dari Buku Putih Kementerian Republik Indonesia, 2014

Tabel 3. Diplomasi Pertahanan secara Bilateral Indonesia dengan Negara Non-ASEAN di Asia Tenggara

Diplomasi Pertahanan secara Bilateral Indonesia dengan Negara Non-ASEAN di Asia Tenggara			
No	Negara yang bekerjasama	Isu Kerjasama	Keterangan
1	Timor Leste	Militer dan pertahanan	Kerja sama pertahanan Indonesia dengan Timor Leste dilaksanakan berdasarkan pada Memorandum of Understanding (MoU) tentang aktivitas kerja sama di bidang pertahanan. Ruang lingkup kerja sama meliputi: Pertama, dialog dan konsultasi bilateral tentang isu-isu strategis pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan bersama; Kedua, pertukaran informasi di bidang pertahanan; Ketiga, meningkatkan kerja sama antar-angkatan bersenjata; Keempat, kerja sama dukungan logistik, Kelima, kerja sama lain yang disepakati bersama.
2	Papua New Guinea	Militer dan Pertahanan	Kerja sama pertahanan yang dilakukan berlandaskan pada Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence. Ruang lingkup kerja sama meliputi: dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian bersama, pertukaran personel dalam rangka pendidikan, pelatihan, dan saling kunjung, berbagi informasi



			pertahanan, pertukaran intelijen, kerja sama di bidang logistik, mendorong kerja sama interoperabilitas antar-angkatan bersenjata, kerja sama di bidang lain sesuai kepentingan bersama.
--	--	--	--

Sumber: diolah dari Buku Putih Kementerian Republik Indonesia, 2014.

Tabel 4. Diplomasi Multilateral dengan Negara ASEAN Di Luar Inisiatif ASEAN

Diplomasi Multilateral dengan Negara ASEAN Di Luar Inisiatif ASEAN			
No	Negara yang bekerjasama	Isu Kerjasama	Keterangan
1	Malaysia, Singapura, dan Indonesia (MALSINDO)	Keamanan	Kerja sama keamanan multilateral untuk menangani masalah bajak laut dengan menyepakati patroli terkoordinasi <i>Malacca Sea Patrol</i> (MSP) atau Patroli Terkoordinasi sejak tahun 2004.

Sumber: diolah dari Buku Putih Kementerian Republik Indonesia, 2014.

Lingkup kerja sama internasional di bidang pertahanan terdiri dari kerja sama bilateral, regional, dan multilateral. Kerja sama bilateral bidang pertahanan dimaksudkan sebagai sarana pengembangan diplomasi pertahanan guna membangun saling percaya. Penyelenggaraan kerja sama pertahanan lebih dikembangkan untuk membangun saling percaya, mencari solusi damai bagi penanganan isu-isu keamanan yang menjadi perhatian kedua belah-pihak, termasuk mendorong peningkatan kapabilitas pertahanan negara (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2014). Tabel di atas menjelaskan daftar diplomasi bilateral Indonesia dengan negara-negara ASEAN, dua negara Asia Tenggara non-ASEAN, dan inisiatif multilateral di luar kerangka akomodasi ASEAN untuk mengintegrasikan kepentingan nasional Indonesia dengan kepentingan kawasan.

Diplomasi total sebagai diplomasi pertahanan Indonesia diselenggarakan berdasarkan kebijakan pertahanan, yaitu melalui segala kegiatan penyelenggaraan pertahanan negara untuk mengoptimalkan kemampuan guna menanggulangi berbagai ancaman. Kebijakan pertahanan negara mencakup pembangunan, pengerahan, maupun pemberdayaan pertahanan negara yang didukung kebijakan penganggaran dan pengawasan. Pelaksanaannya secara terpadu dan terarah bagi segenap komponen pertahanan negara, baik Pertahanan Militer maupun Pertahanan Nirmiliter (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2014).

## Faktor yang mempengaruhi Kapasitas Militer di kawasan Asia Tenggara

### Diplomasi Pertahanan

Faktor yang mempengaruhi kenaikan anggaran militer yakni diplomasi pertahanan yang dilakukan terhadap satu negara terhadap negara lain dalam lingkup Asia Tenggara. Kecenderungan negara-negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan kapasitas militernya sebagai bentuk kesiapan untuk mengantisipasi ancaman. Salah satu caranya dengan menerapkan kerjasama militer atau diplomasi pertahanan dengan negara lain demi tercapainya kepentingan nasional dan stabilitas kawasan. Indonesia melakukan diplomasi pertahanan dalam kerangka kerjasama *Malacca Strait Patrol* yang mulai dibentuk pada tahun 2004 dengan





Singapura dan Malaysia dalam mengamankan selat malaka dari ancaman non tradisional. (Sulistiyani 2019)

Contoh yang lain adalah diplomasi pertahanan yang dijalankan oleh Indonesia dan Singapura dengan sebutan *Indonesia Singapore Coordinated Patrol* yakni latihan gabungan dan program pelatihan, pertukaran kunjungan antar atase, serta alat tambahan bagi personil di atas kapal dan kursus pelatihan staf komando. Kerjasama ini telah mengembangkan hubungan seluruh angkatan laut, dimulai dari tingkat atas melalui komandan senior, sampai ke tingkat junior. Salah satu latihannya bernama *Sea Eagle Joint Exercise* yang dipraktekan dalam rangka profesionalisme dan interoperabilitas Indonesia dan Singapura untuk mengurangi ketidakpercayaan satu sama lain. Latihan tersebut melibatkan KRI Sultan Hasanuddin-366, KRI Sultan Iskandar Muda-367 dan satu Tim Komando Pasukan Katak (kopaska) Koarmatim dan Koarmabar. Ada pula unsur pendukung KRI Teluk Bintuni-520, KRI Lemadang-632, KRI Barakuda-633. Sedangkan dari Singapura adalah RSS Tinacious dan RSS Galaand. Pelaksanaan operasi juga melibatkan unsur kekuatan air dan udara Helly Bell-412 (HU-417) dan MPA CN-235 (P-862) yang memiliki peran peperangan anti kapal permukaan dan anti kapal selam. (Suproboningrum and Kurniawan 2017)

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Collins tahun 2014, 3 negara tersebut meningkatkan anggaran persenjataan sebagai berikut : Indonesia US\$7 Miliar, Malaysia US\$ 4,9 Miliar, Singapura US\$ 9,8 Miliar. (Nugraha 2017). Alasan utama modernisasi sistem persenjataan atau alutsista negara-negara anggota ASEAN tampaknya didorong oleh konsep diplomasi pertahanan secara multilateral yakni ADIC untuk mengurangi perbedaan teknologi dalam hal standarisasi alutsista di Asia Tenggara. Dari penjelasan diatas, negara anggota ASEAN membeli sistem persenjataan atau alutsista dengan kemampuan yang hampir sama dengan maksud untuk interoperabilitas. (Rodon Pedrason 2015) Secara tidak langsung, program program yang diadakan oleh ADMM maupun ADIC merupakan bentuk dari diplomasi pertahanan yang membuat anggaran militer dan kapasitas militer meningkat. (Anwar 2014)

### **Masalah Kedaulatan, Dilema Keamanan serta Sengketa wilayah**

Fenomena naiknya anggaran militer dan langkah strategis di kawasan Asia Tenggara adalah adanya kepentingan berdasarkan konsep negara menurut Westphalia yang masih kental yakni kedaulatan atau teritori, yang secara umum bertujuan untuk menjaga dan mengeksplorasi kekayaan sumber laut, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta keamanan maritim dalam menanggulangi ancaman non tradisional maupun tradisional masing masing negara. (Snyder 2004) Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor seperti peningkatan belanja alat utama sistem pertahanan dan peningkatan anggaran militer di negara-negara Asia Tenggara, Anggaran perbelanjaan militer, personel dan sistem persenjataan.



Tabel 5. Volume Import Alutsista Negara-Negara Asia Tenggara 1999-2018

Recipient	1999-2003	2004-08	2009-13	2014-18	Total	% of South East Asia total
Singapore	1 690	2 469	5 013	1 857	11 030	27.2
Viet Nam	348	755	2 384	4 240	7 727	19.1
Indonesia	766	1 010	1 929	3 590	7 295	18.0
Malaysia	1 073	1 566	2 058	728	5 425	13.4
Myanmar	558	776	1 465	872	3 672	9.1
Thailand	652	255	1 011	1 475	3 393	8.4
Philippines	25	96	161	698	981	2.4
Brunei	10	3	332	159	503	1.2
Cambodia	-	70	183	-	252	0.6
Laos	37	10	78	121	246	0.6
Timor-Leste	-	-	32	-	32	0.1
South East Asia total	5 159	7 010	14 645	13 741	40 556	
Global total	100 146	118 492	135 669	146 291	500 598	
South East Asia % of global total	5.2	5.9	10.8	9.4	8.1	

- = nil.

Source: SIPRI Military Expenditure Database, Mar. 2019.

Berdasarkan data yang dirilis oleh SIPRI, Negara-negara di Asia Tenggara dari tahun ketahun terlihat meningkatkan kapasitas militernya sealama kurun waktu dari 1999 sampai dengan 2018. Beberapa Skema yang dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara adalah dengan adanya penyertaan modal di perusahaan Pertahanan di dalam negeri ataupun dengan kerangka kerjasama dengan perusahaan industri dari luar negeri. Peningkatan kapasitas militer di Asia Tenggara Berdasarkan data yang diliris Pengeluaran militer di Asia Tenggara antara tahun 2009 dan 2018 meningkat 33 persen secara riil, dari \$ 30,8 miliar menjadi \$ 41,0 miliar dalam dolar AS tahun 2017 yang konstan. Ini secara signifikan lebih tinggi dari peningkatan 5 persen secara global tetapi lebih rendah dari total peningkatan untuk seluruh Asia dan Oseania selama periode yang sama, yaitu 46 persen. Namun, pola total belanja militer Asia didominasi oleh peningkatan China sebesar 83 persen, yang pada 2018 menyumbang hampir setengah dari total belanja di Asia dan Oceania (Wezeman 2019). Walaupun peningkatan tersebut tidak merata di seluruh wilayah. Dari 11 negara bagian di Asia Selatan, 6 meningkatkan pengeluaran militer mereka antara 2009 dan 2018. Pertumbuhan Singapura dan Thailand dibatasi pada 14,3 hingga 15,6 persen selama periode 10 tahun, tetapi Vietnam, Filipina, dan Indonesia meningkatkan pengeluaran mereka sebesar antara 50,3 persen dan 99,5 persen, dan Kamboja tidak kurang dari 190,6 persen. Belanja dikawasan ini meningkat dalam kurun waktu 10 tahun kebelakang. Dengan pengecualian Brunei Darussalam, Malaysia, dan Timor-Leste, negara-negara Asia Tenggara mengalami peningkatan pengeluaran selama bertahun-tahun daripada pengurangan pengeluaran (Wezeman 2019). Kemudian jika kita melihat dari jumlah personel dan sistem persenjataan negara-negara di asia tenggara seperti yang di rilis oleh The International Institute for Strategic Studies (2016), Vietnam, Myanmar, Indonesia dan Thailand merupakan negara-negara dengan kapasitas militer yang kuat di kawasan Asia Tenggara jika dilihat dari kekuatan personel dan armada tempur. Perkembangan kapasitas militer di negara-negara Asia Tenggara yang juga diikuti oleh berkembangnya industri pertahanan, hal yang paling nyata adalah negara-negara di Asia Tenggara saat ini sedang meningkatkan armada laut utamanya jenis Kapal Selam (NYTimes 2014). Contoh kasus adalah persoalan Laut Tiongkok Selatan yang sampai sekarang masih menjadi sengketa antara 5 negara yaitu : Indonesia, Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam. Secara wilayah maupun secara kepentingan seharusnya lima negara tersebut solid dan mempunyai arah kebijakan yang sama terkait dengan perairan tersebut, tetapi klaim yang



tumpang tindih dari negara penuntut yang tergabung dalam ASEAN adalah wujud dari konflik kepentingan multidimensi terhadap Laut Cina Selatan. (Suharman 2019) Menurut Truong, politik luar negeri negara di kawasan ASEAN hanya ditempuh oleh masing masing anggota dan sangat identik dengan perilaku negara yakni survive, bukan pada *collective security* atau organisasi secara menyeluruh (Truong and Knio, 2016).

Tabel 6. Kekuatan Personel dan Sistem Persenjataan

Country	Number of soldiers	Light and heavy tanks	Artillery pieces	Fighter planes	Battleships
Cambodia	124,300	220+	433+	5	16
Indonesia	395,500	390	1,110+	104	110
Malaysia	109,000	69	424	67	51
Myanmar	406,000	290+	419+	167	117
Philippines	125,000	7	254+	22	69
Singapore	72,500	446	798+	126	45
Thailand	360,850	487	2,622	150	111
Vietnam	482,000	1,890	3,040+	101	86

Sumber: IISS 2016

Kemudian berkembangnya teknologi militer seringkali menentukan visi serta nasib suatu negara dalam menjalani eksistensinya, sehingga menjadi sebuah keharusan bagi negara untuk meningkatkan kapasitas militer dan sangat mungkin untuk skeptis bahkan cenderung menghambat pertumbuhan negara lain demi kepentingan nasional. Dengan adanya semangat kompetisi antar negara dan cenderung memaksimalkan power nya, memunculkan apa yang disebut *security dilemma* dan defisit kepercayaan. Dalam kenyataannya, *security dilemma* juga berpengaruh terhadap negara yang berada di suatu kawasan yang bersifat *high politics* khususnya militer untuk terus meningkatkan kekuatan pertahanan dan keamanan terhadap reaksi dari aktor atau negara lain, maka dengan sendirinya kapasitas dan kapabilitas militer di kawasan asia tenggara mengalami peningkatan.

Terakhir yaitu sengketa wilayah laut cina selatan, dimana tiongkok merupakan negara yang sedang berusaha dalam meraih dominasi regional, mulai masuk dalam kawasan ini untuk melanjutkan dominasinya. Adanya cadangan sumber-sumber produksi enegeri dan jalur perdagangan potensial di Laut Cina Selatan menjanjikan dalam jangka panjang dan pertukaran barang lintas negara di kawasan Asia Timur, Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Meskipun masing masing negara bertindak sendirian, namun kewaspadaan terhadap tiongkok menjadi timbul sehingga anggaran militer dan alutsista dikerahkan khususnya di wilayah laut cina selatan.

Dalam menyikapi masalah ini, Indonesia mengganti nama Kepulauan Natuna menjadi Laut Natuna Utara. Tindakan ini merupakan penanda politik kepada tiongkok bahwa kawasan tersebut masih milik ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia dan disisi lain menghormati tiongkok sebagai negara sahabat. Kebijakan luar negeri Indonesia didasarkan pada dua hal, pertama adalah lewat jalur diplomatik dalam merespon serta menangani resolusi konflik terkait dengan garis putus putus yang di klaim oleh tiongkok. Kedua adalah pengerahan armada tempur di kepulauan natuna utara. (Suharman 2019) Panglima Komando Armada Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono mengatakan bahwa sudah sepantasnya kita sebagai bangsa Indonesia menjaga dan mengamankan wilayah NKRI, maka dari itu dia mengerahkan empat KRI, 2 jenis Fregat dan 2 jenis korvet. (Nasrullah 2020).



## KESIMPULAN

Perubahan serta dinamika dalam sistem internasional merupakan suatu hal yang sulit untuk diprediksi, dengan berbagai macam ancaman mulai dari tradisional sampai non tradisional. Ditambah dengan adanya rasa tidak percaya antara satu aktor dengan aktor yang lain menjadikan permasalahan berpotensi akan muncul. Kerjasama menjadi formulasi yang tepat dalam mengurangi intensitas negara dalam memunculkan kekuatan militer untuk negara lain dengan mengubah arah kebijakan dengan maksud mensejahterakan negara itu sendiri. Maka dari itu pentingnya suatu kerjasama antara satu negara dengan negara lain maupun menggunakan konsep kawasan sebagai acuan dalam menjaga stabilitas kawasan dan memajukan ekonomi kawasan.

Memang pada awalnya negara negara di asia tenggara mengalami defisit kepercayaan sehingga naiknya anggaran militer setiap negara dibarengi dengan perkembangan teknologi, ditambah dengan adanya sengketa wilayah serta kurang produktifnya ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan ini. Namun setelah adanya ADMM (ASEAN Defense Ministers' Meeting) yang merupakan pertemuan menteri pertahanan seluruh negara di kawasan asia tenggara dalam rangka menyelesaikan masalah non tradisional maupun tradisional, persepsi negara menjadi lebih lunak.

Salah satu cara yang sudah maupun sedang dilakukan oleh negara Indonesia maupun negara lain didalam kawasan adalah Diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan diakui sebagai cara dalam menurunkan tingkat egositas negara sehingga mengurangi rasa ketakutan maupun dilemma yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Langkah yang diambil menyebabkan transformasi serta orientasi negara dalam meningkatkan kapasitas militernya, bukan lagi berdasarkan dilemma atau tentang sengketa, namun lebih kepada penguatan kawasan dengan melaksanakan ADIC (ASEAN Defence Industry Collaboration). Hal ini menyebabkan bahwa diplomasi pertahanan mampu meningkatkan kapasitas militer melalui jalur multilateral atau bilateral sekalipun. Berdasarkan proses maupun hasil yang sudah ada, Indonesia sebagai negara inti di kawasan tersebut harus terus mempertahankan bahkan meningkatkan kepercayaan negara lain melalui politik bebas aktif secara komprehensif untuk terus menjaga stabilitas kawasan serta meningkatkan kapasitas militer di kawasan melalui diplomasi pertahanan untuk kepentingan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, Iip M. 2020. "Terbanyak Di ASEAN, Indonesia Kirim Ribuan Pasukan Perdamaian PBB Setiap Tahun." 2020.
- Andrew Cottey, Anthony Forster. 2004. *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53. New York: Routledge. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Anwar, Syaiful. 2014. "PERAN DIPLOMASI PERTAHANAN DALAM MENGATASI TANTANGAN DI BIDANG PERTAHANAN." *Jurnal Pertahanan* 4: 71–93.
- ASEAN Defense Ministers Meeting. 2020. "Past Meetings and Events (2006 - 2019)." <https://Admm.Asean.Org/>.2020. <https://admm.asean.org/index.php/events/past-meetings-and-events.html>.
- Budi, Triyoga &, and Sugeng Berantas. 2014. "DIPLOMASI PERTAHANAN SEBAGAI BAGIAN DARI DIPLOMASI TOTAL RI." *Jurnal Pertahanan* 4 (2): 165–84.
- Bull, Hedley. 2002. *A Study of Order in World Politics*. Edited by Andrew Hurrell Stanley Hoffmann. Third Edit. New York: Palgrave Publishers Ltd.
- Chang, Jung Yan. 2011. "Defence Diplomacy in ASEAN?" *International Journal* 66 (3): 597–612.



- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Approaches (3rd Edition)*. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. <https://doi.org/10.2307/1523157>.
- Darmawan, Arief Bakhtiar, and Hestutomo Restu Kuncoro. 2019. "Penggunaan ASEAN Way Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Sebuah Catatan Keberhasilan?" *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*. <https://doi.org/10.25077/ajis.8.1.43-61.2019>.
- Drab, Lech. 2018. "Defence Diplomacy – an Important Tool for the Implementation of Foreign Policy and Security of the State." *Security and Defence Quarterly* 20 (3): 57–71. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.5152>.
- Felicia Permata Hanggu, Leonard Hutabarat, Setyo Harnowo. 2018. "Diplomasi Pertahanan Indonesia Kepada Negara Anggota Five Power Defence Arrangements (Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, Inggris) Tahun 2000-2017." *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan* 4: 39–56.
- Husna, Atik Fadilatul. 2012. "Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Memerangi Terorisme Internasional Di Afghanistan Pada Periode Pemerintahan Batack Obama." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- kemenhan. 2015. *Buku Putih Pertahanan*.
- Kemenhan. 2008. "Perkembangan Lingkungan Strategis Dan Prediksi Ancaman Tahun 2008," 1–2.
- . 2020. "Kementerian Pertahanan Hadiri ADMM Retreat, Menhan RI Sampaikan Komitmen Indonesia Wujudkan Asia Tenggara Yang Aman, Damai Dan Sejahteraublik Indonesia." [Kemenhan.Go.Id](http://Kemenhan.Go.Id). 2020.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2014. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2019. "Menhan RI Hadiri Forum ADMM Plus Di Bangkok, Thailand." <https://www.kemhan.go.id/2019/11/18/menhan-ri-hadiri-forum-admm-plus-di-bangkok-thailand.html>. 2019.
- Nasrullah, Nashih. 2020. "Tingkatkan Keamanan, Indonesia Siagakan 4 KRI Di Laut Natuna." *Republika*. 2020.
- Natalegawa, Marty. 2019. *Does ASEAN Matter? Does ASEAN Matter?* <https://doi.org/10.1355/9789814786751>.
- Nugraha, Muhammad Harry Riana. 2017. "Indonesian Future Strategic Defense Planning." *Jurnal Pertahanan* 3: 207–20.
- NYTimes. 2014. "Opinion | The Submarine Race in Asia - The New York Times." 2014.
- Pedrason, Radon. 2015. "ASEAN's Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community?" *Rupert-Karls-Universitat Heidelberg Institut For Politische Wissenschaft*. Universitas Heidelberg Institut For Politische Wissenschaft.
- Pedrason, Rodon. 2015. "ASEAN'S DEFENCE DIPLOMACY: THE ROAD TO SOUTHEAST ASIAN DEFENCE COMMUNITY?" *PRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG*. Heidelberg.
- Rusfiana, Yudi. 2018. "Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Asean Defence Ministerial Meeting (ADMM)." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 4 (2): 145–64. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v4i2.335>.
- Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia. 2020. "ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM) Merupakan Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN Yang Membahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Di Kawasan Guna Meningkatkan Transparansi, Keterbukaan Dan Rasa Saling Percaya Di Antara Negara-Negara Anggota ASEAN." [Http://Setnas-Asean.Id/](http://Setnas-Asean.Id/). 2020. <http://setnas-asean.id/asean-defence-ministers-meeting-admm>.



- Snyder, Craig A. 2004. "Maritime Security in the South China Sea." *Journal of Conflict Studies* 14.
- Suharman, Yoga. 2019. "DILEMA KEAMANAN DAN RESPON KOLEKTIF ASEAN TERHADAP SENGKETA LAUT CINA SELATAN." *Intermestic: Journal of International Studies* 3: 127–46.
- Sulistiyani, Yuli Ari. 2019. "Diplomasi Pertahanan Littoral States Di Selat Malaka Melalui Kerangka Patroli Selat Malaka." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 9: 41–50.
- Suproboningrum, Lintang, and Yandry Kurniawan. 2017. "Diplomasi Maritim Dalam Keberhasilan Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia-Singapura Di Selat Malaka." *Politica* 8: 163–87.
- Syahrin, M Najeri Al. 2018. *Keamanan Asia Timur: Realitas, Kompleksitas Dan Rivalitas*. Depok: Komajoyo Press.
- The International Institute for Strategic Studies (IISS). 2006. "The Military Balance 2016."
- Truong, Thanh-Dam, and Karim Knio. 2016. *The South China Sea and Asian Regionalism*. 1st ed. Germany: Springer.
- United Nations. 2020. "Military Confidence-Building." Un.Org. 2020. [https://www.un.org/disarmament/cbms/#:~:text=Confidence-building measures \(CBMs\),of civilization%2C on all continents](https://www.un.org/disarmament/cbms/#:~:text=Confidence-building measures (CBMs),of civilization%2C on all continents).
- Wezeman, Siemon T. 2019. "Arms Flows to South East Asia." *Stockholm International Peace Research Institute*.
- Yogatama, Adithya. 2018. "Perkembangan Lingkungan Strategis Vietnam Di Kawasan Asia Tenggara - FPCI Chapter UPN Veteran Jakarta." 2018.